

**STATUS SOSIAL “MISKIN” PENERIMA MANFAAT PKH  
BERDASARKAN TEORI DRAMATURGI ERVING GOFFMAN  
DI COT GUD SEUNAGAN TIMUR**

**Rika Sasnita<sup>1</sup> Yeni Sri Lestari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

Email: [rikasasnita@icloud.com](mailto:rikasasnita@icloud.com), [yenisrilestari@utu.ac.id](mailto:yenisrilestari@utu.ac.id)

**Abstrak**

Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah mengadopsi Program Keluarga Harapan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menciptakan program jaminan sosial (PKH). Program bantuan sosial bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) tersedia bagi keluarga berpenghasilan rendah yang teridentifikasi sebagai keluarga penerima PKH (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan saat ini lebih dari apa pun. Ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui Perilaku Sosial Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berdasarkan Teori Dramatugi Erving Goffman di Gampong Cot Gud Kecamatan Seunagan Timur, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi penarikan informan, wawancara mendalam, dan pencatatan agar kualitas data yang terkumpul melalui penyampaian informan yang terkait dengan masalah penelitian.

**Kata kunci:** Perilaku Sosial, Masyarakat Penerima Bantuan PKH, Teori Dramatugi, Erving Goffman

## **I. PENDAHULUAN**

Setiap bangsa di dunia berurusan dengan masalah kemiskinan secara teratur. Bahkan 10% penduduk dunia terkaya memegang 40% aset dunia, yang berasal dari negara-negara dengan sumber pendapatan yang signifikan. Menurut Bank Dunia, 1,4 miliar orang memiliki pendapatan harian kurang dari US\$ 1,25 pada tahun 2008. Ini mencakup sekitar 1 miliar orang, atau sekitar 15% dari populasi dunia. Meski begitu, 192 negara anggota PBB telah mulai menerapkan program “*Millennium Development Goals*” dalam upaya mengakhiri kemiskinan dan kelaparan yang parah (Susanto, 2014).

Dengan 253,60 juta penduduk, Indonesia termasuk negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Sebagai suatu Negara dengan dengan jumlah penduduk yang sangat besar dibarengi dengan luas wilayah 7.81 juta km<sup>2</sup>, yang mana letak geografis daerah kepulauan terbentang dari sabang hingga merauke. Hal demikian menimbulkan berbagai permasalahan sosial pada masyarakat, permasalahan yang sering terjadi di Indonesia yakni salah satunya yaitu kemiskinan baik di perkotaan hingga pedesaan. Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan terhambat oleh krisis ekonomi yang melanda

pada pertengahan tahun 1997. Jumlah orang miskin di Indonesia juga meningkat drastis akibat krisis ekonomi. Dampak krisis ekonomi sulit diatasi dalam semalam. Hal ini dapat dilihat dari tahun 1998 hingga 2004 dimana masih banyak orang miskin dengan terlihat pada tahun 2004 ada sebanyak 36,2 juta jiwa atau sekitar 16,7% (BPS, 2014).

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengakhiri kemiskinan melalui penerapan undang-undang dan inisiatif baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan dapat bersifat tidak langsung ataupun langsung. Kebijakan langsung atau program yang langsung membantu masyarakat yang membutuhkan antara lain program Bantuan Langsung Tunai (BLT), raskin, dan Jamkesmas, serta program IDT dan BOS. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kemiskinan tidak dapat diberantas secara total, yang artinya merupakan masalah yang dapat dengan mudah ditemukan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagian besar program kemiskinan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, bersifat sementara, artinya hanya akan bertahan selama ada alokasi dana; jika uang itu habis, operasi program akan selesai (Nurwati, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, bantuan sosial bersyarat diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dan/atau perorangan yang telah terdaftar dalam program pendataan terpadu untuk penanganan fakir miskin, yang diolah dengan data kesejahteraan sosial dan pusat informasi dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH (PKH) (Permensos, 2018). Sejak tahun 2007, Program Keluarga Harapan menawarkan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan PKH sebagai langkah awal menuju sistem perlindungan sosial. Di Indonesia, kluster I inisiatif untuk mengurangi kemiskinan meliputi program bantuan dan perlindungan sosial yang dikenal sebagai PKH. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat untuk kebutuhan di bidang pendidikan serta kesehatan (TNP2K, 2019).

Keluarga miskin (yaitu orang tua serta anak) ialah penerima manfaat PKH. Satu orang bertanggung jawab atas kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, serta masa depan anak. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengakhiri siklus kemiskinan antar generasi, keluarga merupakan satu kesatuan yang sangat penting (Kementerian Keuangan, 2018).

Kajian dalam penelitian ini meliputi perilaku sosial masyarakat penerima bantuan PKH di Gampong Cot Gud Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Permasalahan tersebut disebabkan karena terdapat beberapa masyarakat yang berdrاما mengenai kehidupan sosial ekonomi mereka, hal ini karena mereka menganggap dapat mendapatkan bantuan PKH jika mereka berbohong dan berdrاما tentang finansialnya. Maka atas permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui *Status Sosial "Miskin" Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Berdasarkan Teori Dramaturgi Erving Goffman Di Gampong Cot Gud Kecamatan Seunagan Timur*

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Konsep Kemiskinan

Pemberantasan kemiskinan di daerah pesisir dan pedesaan Indonesia saat ini sudah menjadi isu krusial bagi pemerintah dan menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Gagasan tentang kemiskinan didasarkan pada beberapa deklarasi profesional tentang kemiskinan. Suharto mengatakan salah satunya dalam Ibrahim. (Bakri et al., 2020) mengatakan bahwa sejak manusia lahir, kemiskinan pada hakikatnya telah menjadi persoalan klasik. Kemiskinan adalah masalah yang rumit, dan tampaknya terkadang masih menjadi masalah. Meskipun pada kenyataannya sampai pada saat ini belum adanya solusi dalam mengambil langkah strategi terhadap pemberantasan kemiskinan yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia terkhusus pemerintah Aceh. Tercatat sejak tahun 2021 Aceh menduduki peringkat pertama dengan jumlah angka kemiskinan di pulau Sumatera berdasarkan data BPS angka kemiskinan dari Maret 2021 hingga September 2021, jumlah penduduk miskin di Aceh naik 0,20 persen atau 16 ribu orang menjadi 15,53 persen atau total 850 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2014).

Dalam masyarakat, kemiskinan adalah masalah sosial tersembunyi yang selalu hadir, terutama di negara-negara berkembang. Setiap kelompok, termasuk akademisi dan praktisi, tertarik pada kemiskinan. Untuk mengangkat tabir dan berpotensi mengungkap "misteri" di balik kemiskinan ini, beberapa hipotesis, konsep, dan metodologi terus-menerus diproduksi. Kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diteliti secara teratur dalam konteks masyarakat secara keseluruhan. Beberapa teori mengemukakan konsep kemiskinan antara lain adalah: Pertama, menurut menurut Chambers dalam Iskandar mengemukakan bahwa Satu pendekatan, kemiskinan pendapatan atau "properti pendapatan", terus mendominasi cara kita berpikir tentang kemiskinan. Para profesional ilmu sosial mengkritik keras teknik ini karena tidak mampu melukiskan gambaran lengkap tentang kemiskinan. Ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan karena pendapatan yang rendah tampaknya menjadi satu-satunya indikasi kemiskinan. Meskipun Indonesia tercatat sebagai salah satu negara berkembang yang berhasil mengentaskan kemiskinan, namun jumlah penduduk miskinnya selalu tinggi, baik secara absolut maupun relatif, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Akibatnya, persoalan kemiskinan kembali menjadi perhatian utama bangsa ini karena tidak hanya kembali lagi, tetapi dimensinya juga semakin kompleks seiring dengan penurunannya. Kedua, menurut Suharto dalam Iskandar mengatakan bahwasanya Kemiskinan memiliki pengaruh buruk terhadap masyarakat secara keseluruhan yang semakin berkembang (*multiplier effect*). Banyaknya perselisihan di tanah air yang meletus saat krisis ekonomi, misalnya, menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berdampak pada jaminan sosial dan ketahanan nasional, tetapi juga ketahanan ekonomi yang terlihat dari rendahnya daya beli masyarakat.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, Untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber baik berupa buku maupun karya tulis ilmiah dari kajian terdahulu, penulis melakukan kajian pustaka. Hanya sedikit orang yang berbicara secara mendalam tentang penelitian ilmiah, terutama jurusan sosiologi. Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka yang penulis lakukan di lapangan, maka penulis menemukan beberapa Skripsi sebagai referensi penulis. Penelitian (Riyadi, 2016) dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan Studi di Kecamatan Gunung Kabupaten Lampung Tengah” menyatakan bahwa Kabupaten Gunung Sugih melaksanakan PKH dari tahun 2011 hingga 2014 sesuai dengan ketentuannya, meliputi aspek input seperti identifikasi rumah tangga sasaran (RTS), aspek proses seperti kegiatan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok, dan pemutakhiran data, dan output aspek seperti verifikasi komitmen dan distribusi bantuan.

Penelitian (Lidya, 2011) dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Administrasi Jakarta Utara (Studi Kasus di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok) dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas, antara lain proses sosialisasi yang tidak merata, pencairan dana yang terlambat, dan penilaian penduduk miskin di Kelurahan Warakas yang tidak lengkap, yang hanya menggunakan data dasar.

Penelitian (Alamin, 2010) dengan judul “ Analisis Peran Pendamping PKH Pada Suku Dinas Sosial ( Jakarta Utara) menyatakan bahwa“ peran seseorang yang menjadikan dirinya sebagai mediator, fasilitator, pendidik, pemungkin sekaligus sebagai anggota atau peserta PKH berdaya dalam membangun hidup mereka secara mandiri. Selain menjadi “agen perubahan” yang mengorganisir kelompok masyarakat, pendamping harus pula melaksanakan tugas teknis, seperti: melakukan analisis sosial dan mengelola bantuan langsung lainnya seperti BLSM.

#### **b. Strategi Pemberantasan Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi landasan strategi pembangunan Indonesia hingga saat ini. Tampak bahwa ekspansi ekonomi yang signifikan tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan di semua kategori masyarakat. Pertumbuhan dan pemerataan jadi berdagang satu sama lain. Budaya konglomerat dikembangkan di lingkungan strategis ini dengan tujuan memberikan dampak trickle down pada strata ekonomi di bawahnya.

Pendekatan ini didasarkan pada pengembangan industri yang luas. Persoalannya adalah mekanisme trickle-down effect yang disebut-sebut berkembang seiring dengan meningkatnya akumulasi modal dan terciptanya lembaga-lembaga ekonomi yang mampu mendistribusikan kekayaan secara adil. Tetesan dorongan atau pemerataan ke bawah, di sisi lain, tidak terwujud, mungkin karena kebijakan pemerintah sejak awal ambigu dan

oportunistik. Pada akhirnya, yang terjadi adalah ketimpangan distribusi uang terkait pembangunan.

Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai bangsa. Masalah terbesar di negara terbelakang adalah kemiskinan. Jutaan anak tidak dapat menerima pendidikan yang berkualitas karena kemiskinan, yang juga mempersulit mereka untuk membayar perawatan medis mereka, mencegah mereka menabung untuk investasi, mencegah mereka mengakses layanan publik, mencegah mereka mencari pekerjaan, menghalangi mereka untuk memiliki jaminan sosial dan perlindungan bagi keluarga mereka, dan, yang lebih parah, memaksa jutaan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak seberapa akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Karena kemiskinan, penduduk desa mempertaruhkan kesehatan fisik mereka dengan bekerja keras untuk menghasilkan pendapatan bagi perantara lingkungan sambil juga mendapatkan pembayaran yang tidak cukup untuk menutupi biaya tenaga kerja mereka. Pekerja pertanian di desa bekerja keras sepanjang hari dengan uang yang sangat sedikit (Sahdan, 2005).

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat pelik yang telah lama menjadi perhatian pemangku kepentingan Indonesia, sehingga menjadi perhatian nasional yang harus diprioritaskan dengan berbagai upaya strategi penanggulangan. Untuk melakukan ini, masalah harus dianalisis dengan baik, melibatkan semua komponen masalah, dan membutuhkan strategi koping yang tepat, berkelanjutan, dan tidak sementara. Berbagai indikator dapat digunakan untuk memantau masalah kemiskinan, dan dari variabel-variabel ini, dihasilkan sejumlah strategi dan kebijakan yang terfokus dan berjangka panjang untuk mengurangi kemiskinan. Misalnya, dari perspektif pendidikan, kemiskinan dianggap sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan. Dari perspektif kesehatan, kemiskinan adalah akibat dari kesehatan masyarakat yang buruk. Dari perspektif ekonomi, kemiskinan dikatakan disebabkan oleh kombinasi faktor termasuk kurangnya akses ke instrumen produktif, kurangnya keahlian teknologi, dan kurangnya keterampilan. Tingkat kekayaan dan kesejahteraan masyarakat sering dianggap dipengaruhi oleh variabel struktural dan budaya. Strategi ini tidak memiliki kekurangan yang melekat, tetapi perlu mengintegrasikan berbagai elemen yang berkontribusi terhadap kemiskinan dengan metrik yang berbeda agar upaya untuk menguranginya menjadi tahan lama dan berkelanjutan.

Indikator kemiskinan BAPPENAS memiliki definisi yang cukup luas, dengan mempertimbangkan beberapa bidang kebutuhan hidup, meliputi; (1) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (2) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (3) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (4) lemahnya jaminan rasa aman; (5) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan

inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik; (9) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (10) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (11) lemahnya partisipasi; (12) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (13) degradasi lingkungan dan sumber daya alam, akses publik yang terbatas, korupsi yang merajalela, dan jaminan sosial yang tidak memadai bagi masyarakat adalah semua masalah (Sahdan, 2005).

Adapun strategi pemecahan masalah pemberantasan kemiskinan dengan efektivitas penerima bantuan PKH yaitu menggunakan analisis SWOT dengan melihat empat teknik pemetaan dalam mengambil langkah strategi penanggulangan yaitu sebagai berikut: 1. *Strengths* (kekuatan), 2. *weaknesses* (kekurangan), 3. *Opportunities* (peluang), 4. *threats* (ancaman).

### c. Teori Dramaturgi

Teori Dramaturgi ialah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana interaksi sosial dilihat dengan cara yang sama seperti pertunjukan teater atau drama di atas panggung berpendapat bahwa orang adalah aktor yang berusaha untuk mengintegrasikan maksud dan tujuan mereka sendiri dengan orang lain melalui tindakan mereka sendiri (Widodo, 2015). Manusia akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung fungsinya untuk mencapai tujuannya. Identitas manusia adalah target yang bergerak, dan identitas adalah komponen dari jiwa yang berbeda. Bergantung pada bagaimana Anda terhubung dengan orang lain, identitas Anda mungkin berbeda. Dalam pementasan drama, kehidupan seorang aktor drama juga harus dipersiapkan untuk kepenuhan pementasan, yang meliputi bahasa yang digunakan, pakaian, lingkungan, dan isyarat nonverbal lainnya. Tujuannya adalah untuk meninggalkan kesan positif pada interaksi lawan dan membuka jalan menuju hasil yang diinginkan.

Dramaturgi yang diciptakan oleh Goffman's ialah perkembangan gagasan interaksi sosial, yang muncul sebagai hasil penerapan konsep-konsep segar dari peristiwa penilaian sosial ke masyarakat modern. Teori drama adalah tanggapan terhadap peristiwa seperti meningkatnya perselisihan rasial dan sosial, efek birokrasi yang menindas, dan efek industrialisasi.

Oleh karena itu, metode dramaturgi berfokus pada bagaimana individu berperilaku daripada apa yang mereka lakukan, apa yang ingin mereka capai, atau mengapa mereka melakukannya (Mulyana & Dedy, 2008). Menurut Goffman, Ada "wilayah depan" (*front region*) dan "wilayah belakang" dalam kehidupan sosial (*back region*). Bagian depan menyerupai panggung depan yang disaksikan penonton, dan area belakang menyerupai panggung tempat orang-orang dapat bersantai, mempersiapkan, atau berlatih untuk bagian mereka di panggung depan (Mulyana & Dedy, 2008).

*Front Stage* adalah panggung yang terdiri dari segmen penampilan dan fashion performance (manner). Aktor akan membangun dan menampilkan diri yang ideal pada tahap ini, yang akan ditekankan dalam interaksi sosial mereka. Gambaran seorang

penampil mencapai konsep diri idealnya yang dapat diterima penonton adalah seperti apa seharusnya manajemen kesan yang sempurna. Ruang di sebelah panggung depan yang tidak terlihat oleh penonton dikenal sebagai *back stage*. Penonton seringkali tidak diizinkan mengunjungi area belakang panggung, kecuali dalam keadaan darurat, karena hal ini dilakukan untuk menjaga anonimitas pertunjukan. Orang akan tampil "utuh" dalam arti identitas asli mereka di panggung ini (Mulyana & Dedy, 2008).

Goffman belajar melalui pembicaraan tentang drama tersebut bahwa meskipun para aktor mungkin membawakan pertunjukan untuk orang lain, pendapat mereka tentang drama tersebut dapat berbeda, sebagian orang bisa merasa yakin terhadap penampilan yang ditampilkan dan bisa pula bersikap kontra dan tidak yakin terhadap pertunjukan itu. Bila Seseorang akan menampilkan citra idealnya melalui tindakan sehari-hari (sebagaimana ditentukan oleh status sosialnya): "Seorang aktor lebih suka menekan atau mengabaikan perilaku, fakta, dan alasan yang tidak sesuai dengan citra diri dan barang idealnya." Meskipun orang tersebut memiliki beberapa rutinitas, dia sering bertindak seolah-olah rutinitas "sekarang" adalah yang paling penting. Jarang sekali tugas-tugas biasa ini dilakukan sendirian. Dalam istilah tim untuk "sejumlah individu yang bekerja sama mementaskan suatu routine". tim yang demikian itu mungkin berupa masyarakat penerima manfaat yang melaksanakan routine yang yang timbal balik dengan faktanya aktor dapat bertukar peran serta memerankan perannya masing-masing.

Konsep "*Idealization*" Goffman mengatakan ialah "*The status symbols used to convey financial affluence are maybe the most significant piece of sign equipment connected to social class.*". Secara khusus, "idealisasi" simbol status di antara sekelompok individu, yang pada akhirnya mengungkapkan posisi sosial mereka. Ini karena kelompok yang bersangkutan akan sangat menghargai simbol status material mereka. Mengapa gagasan idealisasi dalam kelompok komunal menjadi salah satu elemen penting yang ditekankan Goffman? Hal ini agar mereka merasa terlibat dalam proses pementasan sambil menjaga jarak aman dari aktor, penonton (dalam proses dramaturgis) menginginkan kredibilitas dalam pementasan aktor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori dramaturgi Goffman benar-benar menggunakan proses interaksionisme simbolik, baik dalam interaksi individu maupun dalam interaksi kelompok. Aktor dan pemirsa berpartisipasi dengan cara mereka terhubung bersama.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif memakai kualitas data yang diperoleh melalui penyampaian informan yang terkait dengan masalah penelitian diprioritaskan oleh strategi penarikan informan (Moleong, 1994). Wawancara mendalam dan dokumentasi adalah dua pendekatan yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. Mereka juga membuat temuan yang mudah dipahami oleh para peneliti dan orang lain (Moleong, 2009). Analisis kualitatif akan dilakukan pada semua data yang terkumpul (Sugiyono, 2016). Metode ini membagi data menjadi dua kategori: data etis yang berasal

dari teori dan data emic yang berasal dari penelitian lapangan (Sugiyono, 2015). Selain itu, metode memadatkan hasil analisis data dapat dikuantifikasi, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahkan menjadi temuan baru, dan membangun tata kelola manajemen administrasi, khususnya prosedur penilaian program pemerintah pusat. Oleh karena itu penelitian ini mendeskripsikan realitas sosial KPM di Gampong Cot Gud, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian. Pada tempat inilah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat penerima manfaat bantuan PKH, pendamping PKH, Tokoh Masyarakat Gampong, aparatur gampong, serta Pihak Dinas Sosial Nagan Raya yaitu Koordinator PKH lingkup Kabupaten. Dalam analisis ini, berbagai interpretasi dipilih, dibandingkan, digabungkan, dan disortir hingga informasi terkait ditemukan.

#### **IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bagi rumah tangga yang mematuhi larangan yang diberlakukan untuk mengubah perilaku masyarakat miskin. Program penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan dikelola oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat pusat maupun daerah. Masyarakat miskin membutuhkan pendampingan dari pelaksana PKH di tingkat kecamatan untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai peserta. Mereka yang menerima bantuan dalam program PKH harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018.

Keluarga serta individu miskin dan rentan dapat memperoleh bantuan sosial bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini ditunjukkan pada perangkat lunak untuk mengolah data masyarakat miskin yang terintegrasi. Sebelum mengklasifikasikan keluarga sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melakukan pendataan (KPM). Tujuan jangka pendek program ini adalah untuk meringankan beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dan tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar darinya. Melalui PKH, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) didorong untuk mengakses dan memanfaatkan pelayanan sosial mendasar di bidang pangan dan gizi, pendidikan, perawatan, kesehatan, dan dukungan berbagai program perlindungan sosial tambahan yang merupakan pelengkap program jangka panjang.

Di Desa Cot Gud, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan sejak tahun 2007. Sebelum adanya PKH ini, kemiskinan di Desa Cot Gud Kecamatan Seunagan Timur setiap tahunnya meningkat; bantuan telah diberikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi jumlah orang miskin terus bertambah. Oleh karena itu, pemerintah membuat program dengan tujuan membantu keluarga berpenghasilan rendah dalam memperoleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di bangsa ini dieksplisitkan melalui inisiatif ini.

Pemerintah menawarkan bantuan keuangan bersyarat melalui PKH kepada manula di atas usia 70 tahun dan mereka yang memiliki keterbatasan berat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan mereka. Pendapat masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Cot Gud, menganggap dengan adanya program bantuan PKH di Desa Cot Gud ini dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi Pendidikan dan penunjang kehidupan sehari-hari. Di Desa Cot Gud memiliki penerima manfaat PKH yang berkisar 17 anggota. Masyarakat juga memberikan alasan mengapa mereka terpilih sebagai penerima bantuan PKH karena beberapa kriteria yang diperlukan terdapat pada keluarga mereka. Setiap tahunnya penerima PKH mengalami penurunan jumlah. Pemerintah pusat memutuskan siapa yang akan mendapatkan manfaat PKH, dan koordinator kabupaten Nagan Raya kemudian menyerahkan nama-nama tersebut (KORKAB). Anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Seunagan Timur berjumlah 361 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas sosial dan koordinator pendamping PKH baik di kabupaten maupun daerah, memperoleh analisis hasil bahwa penetapan kriteria bagi calon penerima PKH itu sudah ditetapkan oleh dinas sosial dengan beberapa kategori khusus seperti kategori ibu hamil / nifas dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp 3 juta, Pendidikan anak usia dini (usia 0 hingga 6 tahun) menerima Rp3 juta, siswa SD menerima Rp900 ribu, siswa SMP menerima Rp1,5 juta, siswa SMA menerima Rp2 juta, penyandang disabilitas berat menerima Rp2 juta, dan manula menerima Rp. 2,4 juta untuk dana pendidikan.

Program PKH ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam segi pangan, ekonomi dan Pendidikan anak. Ada beberapa masyarakat penerima bantuan PKH ini merasa sangat terbantu, baik dalam segi finansial seperti mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dan memenuhi kesejahteraan Kesehatan masyarakat, namun di dalam masyarakat juga terdapat beberapa keadaan dimana masyarakat yang tidak mengerti bagaimana pengelolaan dana bantuan PKH tersebut serta mereka bukanlah termasuk kriteria sebagai penerima PKH pada umumnya.

Tujuan penyaluran PKH bagi masyarakat kurang mampu adalah untuk meringankan beban keuangan mereka. Penerima manfaat PKH harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu serta unsur-unsur penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat memperoleh bantuan ini, yang tidak diberikan secara cuma-cuma.

Penerima PKH memiliki kriteria khusus yang menjadi tolak ukur calon penerima bantuan tersebut. Akan tetapi keadaan di lapangan berbanding terbalik dengan kriteria yang sudah ditetapkan, banyak dari masyarakat yang berlakon seakan-akan berhak mendapatkan bantuan PKH, hal ini memicu kecemburuan sosial dari masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH. Masyarakat di Desa Cot Gud yang menjadi penerima bantuan PKH kebanyakan masyarakat yang finansialnya tergolong mampu dan berlakon

seolah-olah mereka berhak menerima bantuan dikarenakan memiliki salah satu kriteria sebagai penerima PKH. Pada umumnya banyak masyarakat di Desa Cot Gud berhak menerima PKH akan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut karena ada beberapa data yang tidak terakses oleh pihak pusat.

#### **A. Perilaku Sosial Masyarakat Penerima Bantuan PKH Di Gampong Cot Gud**

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas bahwa Masyarakat Gampong Cot Gud menjalani gaya hidup hedonisme dan konsumerisme yang terlihat di ruang publik. Gaya hidup ini merupakan kegiatan mencari kesenangan dan kesenangan duniawi untuk menampilkan kesan mampu, mewah, mengikuti trend, serta memiliki harga diri dan keinginan untuk menunjukkan kelas sosial seseorang. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka harus melakukan sejumlah pengorbanan, termasuk waktu, tenaga, dan bahkan harga diri mereka. Semua ini dilakukan hanya untuk citra diri dan untuk terlibat dalam hubungan sosial yang dibangun komunitas. Menurut Goffman, Aksi KPM PKH di Desa Cot Gud mirip akting dalam sebuah drama. Panggung depan merupakan komponen dari setiap pementasan dan berfungsi untuk menampilkan kehadiran mereka kepada semua orang yang menonton pertunjukan. Mereka berpakaian seperti artis yang menggambarkan berbagai ikon masyarakat di panggung depan. Merujuk analisis dari beberapa wawancara dan observasi di atas yang menjadi panggung depan daripada KPM PKH ketika memainkan peran agar terlihat seperti tuntutan komunitasnya meliputi memberikan pendidikan tinggi untuk anak, membangun rumah bagus, menggunakan Perhiasan, Memberikan *Gadget* terbaru untuk anak-anaknya. Sebenarnya, di belakang panggung adalah tempat tinggalnya. Banyak kegiatan yang dilakukan penerima manfaat PKH di belakang layar untuk memainkan peran ini termasuk kerja paruh waktu, menjual, dan menyisihkan sebagian dana PKH untuk membeli barang-barang mahal dan kelas atas. Semua ini dilakukan dalam rangka mengembangkan konsep diri ideal yang diinginkan.

Ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan PKH adalah salah satu masalah yang sangat sering dialami dalam sebuah desa, hal ini karena keadaan masyarakat yang memalsukan keadaan ekonomi dan status sosialnya. Akibatnya, hal tersebut masih belum efektif yang diukur dari pencapaian tujuan yang digunakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan PKH di Gampong Cot Gud Kecamatan Seunagan Timur. Jika tujuan dan proses tercapai sesuai dengan tujuan, Program Keluarga Harapan (PKH) harus dianggap efektif.

Keadaan dilapangan yang bertolak belakang dengan data yang diterima oleh pihak koordinator atau dinas, hal ini disebabkan karena adanya berbagai lakonan yang dilakukan oleh penerima manfaat. Kebanyakan masyarakat menganggap bantuan PKH bisa diterima oleh siapa saja tanpa adanya kriteria khusus sehingga mereka menggunakan wewenang orang dalam dalam pemalsuan data terkait sosial ekonomi mereka demi menjadi anggota penerima bantuan PKH, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidaktepatan sasaran bagi penerima PKH. Perilaku masyarakat tersebut

membuat penyaluran bantuan PKH di Desa Cot Gud ini tidak tepat sasaran sehingga anggota masyarakat yang mampu namun mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan PKH tidak menerima bantuan sosial PKH tersebut.

Pihak aparaturnya desa seharusnya lebih teliti dalam merekap data calon penerima PKH, yaitu dengan tidak menerima data dari masyarakat tanpa memeriksa terlebih dulu keadaan finansial masyarakat dan memeriksa apakah terdapat kriteria sebagai penerima PKH pada masyarakat tersebut sebelum memberikan kepada pihak dinas, pihak aparaturnya desa adalah pihak yang mempunyai wewenang paling utama terhadap calon penerima PKH, hal ini dikarenakan data yang diterima oleh koordinator dan pendamping desa diperoleh dari aparaturnya desa, kemudian data tersebut dikirim kepada pihak dinas untuk ditentukan penerima bantuan PKH.

Dapat disimpulkan bahwa, demi menjadi penerima manfaat PKH di Gampong Cot Gud masyarakat melakukan drama untuk menutupi keadaan ekonomi dan status sosial mereka sehari-hari, sehingga mereka terpilih menjadi penerima bantuan PKH sedangkan ada beberapa masyarakat yang kurang mampu akan tetapi tidak menerima bantuan PKH tersebut karena berbagai alasan, hal ini yang menjadi penyebab ketidaktepatan sasaran bagi penerima dana bantuan PKH di gampong Cot Gud sehingga menimbulkan cemburu sosial antara masyarakat kurang mampu dengan masyarakat yang mampu dan menerima bantuan PKH. Selain itu keadaan tersebut juga menjadi suatu keberuntungan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH padahal dalam kehidupan sehari-hari mereka cukup mampu sebagai penerima PKH.

Tanggung jawab pemerintah daerah (PEMDA) dalam pengalokasian bantuan sosial adalah bahwa data kelompok penerima program PKH harus dapat menggambarkan penerima manfaat program PKH agar akurat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana bantuan PKH secara umum adalah dengan menerjunkan langsung tim Kementerian Sosial (KEMENSOS) kelapangan untuk perbaikan data calon penerima dana bantuan PKH tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat penerima bantuan PKH di Gampong Cot Gud, terdapat fakta bahwa mereka merasa kurang mampu, akan tetapi banyak dari masyarakat lain menilai bahwa ada beberapa masyarakat penerima bantuan PKH di Gampong Cot Gud ini banyak yang memperlihatkan keadaan kurang mampu mereka padahal pada nyatanya mereka masih sangat mampu dalam keadaan finansialnya.

Meskipun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya desa, menerangkan bahwa pada masalah perilaku sosial masyarakat yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH ini mereka menemukan beberapa masalah masyarakat yang pada dasarnya tidak berhak menerima bantuan PKH, akan tetapi masyarakat tersebut menceritakan keadaan mereka dengan drama bahwa mereka adalah masyarakat yang tidak mampu. Pihak aparaturnya Gampong Cot Gud mencari solusi dengan melaporkan kepada pendamping daerah dan koordinator kabupaten agar ditindaklanjuti masalah yang sedang terjadi, dan mencoba mengusulkan data masyarakat yang seharusnya menjadi

calon penerima PKH. Solusi tersebut adalah salah satu yang saat ini sedang ditempuh oleh pihak aparat desa dan sedang menunggu respon dari pihak dinas untuk pemberhentian penyaluran dana PKH terhadap masyarakat yang tidak berhak menerima dana PKH.

Menurut pihak koordinator kabupaten salah satu cara yang ditempuh jika mendapati penerima bantuan PKH yang mampu dalam hal finansial dan masih mendapatkan bantuan, mereka kembali memproses data penerima dan memberhentikan penyaluran bantuan PKH, dengan memberikan asumsi dasar dan pemberitahuan mengenai kriteria yang seharusnya dimiliki oleh penerima PKH. Kemudian melakukan sinkronisasi data penerima PKH pada setiap desa. Hal ini untuk mengatasi ketidaktepat sasaran calon penerima PKH. Serta melakukan observasi langsung bersama pendamping PKH ke rumah-rumah masyarakat kurang mampu.

Untuk memastikan pendistribusian uang bantuan PKH itu akurat dan berjalan sebagaimana mestinya, Kementerian Sosial (KEMENSOS) mengungkapkan tiga teknik. Secara umum, Kemensos akan memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di kementerian. Strategi *pertama* pihaknya akan melakukan sinkronisasi dan pemadanan data penerima bantuan PKH dengan NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) di Kabupaten serta NIK siswa di Dinas Pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari perolehan data yang ganda. *Kedua*, Dengan meningkatkan program nontunai, Kementerian Sosial menyempurnakan sistem penyaluran bansos. Upaya ini sudah diterapkan untuk sejumlah program bansos seperti PKH, dan program bantuan Non tunai (BPNT), atau kartu sembako. Selain bantuan sosial biasa, PT Pos Indonesia (PERSERO) juga memberikan bantuan sosial non moneter selama wabah Covid-19, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST). *Ketiga*, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan teknologi digital. Dalam hal ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga terkait, mulai dari Bank Indonesia, regulator jasa keuangan, dan lembaga pemeriksa keuangan, untuk meningkatkan layanan publik dengan menggunakan teknologi digital.

Metode teatrical lebih menekankan pada bagaimana sesuatu dilakukan daripada pada apa yang sebenarnya dilakukan orang, apa yang ingin mereka capai, atau mengapa mereka melakukannya. Dramaturgi menekankan aspek ekspresif dari aktivitas manusia dan didasarkan pada gagasan Kenneth Burke bahwa tindakan diperlukan untuk pengetahuan yang lengkap tentang perilaku manusia. Burke membedakan antara gerak dan aksi, yang dianggapnya sebagai konsep fundamental dalam dramaturgi. Gerakan adalah perilaku yang memiliki makna dan aktivitas yang disengaja, sedangkan tindakan terdiri dari perilaku yang disengaja dan memiliki tujuan. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan PKH pada masyarakat, dimana aksi dimunculkan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga timbul gerakan dari masyarakat untuk memanfaatkan apa yang diperoleh dari upaya masyarakat

dengan memanfaatkan dana PKH untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, baik dalam bidang pendidikan anak, kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

Bagi keluarga penerima manfaat PKH yang berpenghasilan rendah, cacat, dan rentan yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang telah diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, dikenal adanya program bantuan sosial bersyarat sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan maksud untuk meningkatkan akses KPM terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan guna membantu peningkatan taraf hidup keluarga berpenghasilan rendah, serta menurunkan beban keuangan dan meningkatkan pendapatannya. Dengan PKH, masyarakat diharapkan dapat membayar kebutuhan pokok seperti pendidikan dengan lebih terjangkau, menyediakan makanan yang baik dan bergizi untuk bayi dan balita, serta mendapatkan pelayanan kesehatan baik di posyandu maupun pustu. PKH juga diharapkan dapat membantu masyarakat mencapai kekayaan.

Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa keadaan masyarakat di Gampong Cot Gud yang melakukan lakonan atau drama terhadap kehidupan mereka demi mendapatkan bantuan PKH, secara dasarnya kehidupan mereka masih tergolong mampu, namun dengan beberapa dorongan keinginan ingin memiliki keuntungan dari bantuan yang disalurkan oleh pemerintah membuat mereka memilih menciptakan drama dalam kehidupan mereka seakan-akan mereka tidak mampu secara finansial, padahal terdapat masyarakat yang dapat dikatakan memiliki kriteria sebagai penerima PKH akan tetapi mereka tidak termasuk sebagai penerima bantuan PKH.

Berdasarkan Teori Dramaturgi, Ada sebagian Penerima manfaat yang beraksi untuk mendapatkan bantuan dan ada pula sebagian lainnya yang hanya menerima tanpa berusaha untuk harus mendapatkan bantuan sosial PKH. Namun demikian, saat ini pendamping sudah bekerja dengan maksimal dan menentukan keluarga yang benar-benar berhak ditetapkan sebagai penerima manfaat, sehingga akan minim terjadinya ketidaktepat sasaran bantuan PKH.

## **V. PENUTUP**

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah inisiatif penyediaan rumah terekam dalam program data terpadu pusat data dan informasi kesejahteraan sosial untuk penanganan fakir miskin, yang diolah untuk mengidentifikasi rumah tangga penerima PKH yang menerima bantuan sosial bersyarat. Permasalahan yang terjadi di Gampong Cot Gud adalah perilaku sosial masyarakat penerima manfaat PKH. Namun, Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa keadaan masyarakat Penerima manfaat di Gampong Cot Gud yang melakukan drama atau lakonan terhadap kehidupan mereka demi mendapatkan bantuan PKH, secara dasarnya kehidupan mereka masih tergolong mampu. Padahal terdapat masyarakat yang dapat dikatakan memiliki kriteria sebagai penerima PKH akan tetapi mereka tidak termasuk sebagai penerima bantuan PKH.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alamin, A. R. (2010). *Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Neraca Sosial Ekonomi*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/104/neraca-sosial-ekonomi.html>
- Bakri, R., Sagrim, B., Rimba, A. S., & ... (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Bone. *Jurnal Pallangga Praja ...*, 14(1), 113–137.
- BPS. (2014). *Statistik Keuangan*. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nagan Raya.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*.
- Lidya, N. (2011). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Administrasi Jakarta Utara (Studi Kasus di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 5(5), 218–226.
- Moleong, L. J. (1994). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rosda*.
- Mulyana, & Dedy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1–11.
- Permensos. (2018). *Menambah Semangat Para Pelaku Usaha melalui Monitoring dan Evaluasi*. 2018. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/1620-2973084877>
- Riyadi, S. (2016). *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (Studi Di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*. Universitas Lampung.
- Sahdan, G. (2005). Menanggulangi Kemiskinan Desa. *Jurnal Ekonomi Rakyat, Ekonomi Rakyat Dan Kemiskinan*, Maret.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*. Alfabeta.

Susanto, A. (2014). *ANALISIS KEMISKINAN DAN KESENJANGAN DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 DAN 2011 DENGAN APLIKASI ADePT (AUTOMATED DEVELOPMENT ECONOMIC AND POVERTY TABLES)*. Universitas Gadjah Mada.

TNP2K. (2019). *Central and Regional Collaborative Strategy to End Extreme Poverty*. TNP2K. <https://www.tnp2k.go.id>

Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press.